

**Peningkatan Produktivitas Dalam Rangka Mewujudkan Pekerjaan Layak dan  
Pertumbuhan Ekonomi  
(Tujuan ke-8 Sustainable Development Goals)**

Vivi Marietha Ponto

Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perdagangan  
Email : vvmarietha@gmail.com

**Abstrak**

Pembangunan Berkelanjutan memperhatikan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan secara bersamaan. Terdapat tiga elemen yang harus diselaraskan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial dan perlindungan lingkungan hidup. Adapun pekerjaan yang layak (*decent works*) dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan dari SDGs yang diperlukan untuk memulihkan perekonomian Indonesia yang tergerus akibat krisis pandemic Covid-19. Untuk memulihkan perekonomian Indonesia, perlu didukung dengan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas yang akan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Artikel ini membahas keterkaitan antara peningkatan produktivitas dan perwujudan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan tujuan ke-8 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pekerjaan yang layak didukung oleh upah yang layak dan hal-hal lainnya yang menunjang kesejahteraan pekerja yang diberikan oleh pemberi kerja. Apabila hal ini dilakukan oleh pemberi kerja maka produktivitas pekerja akan meningkat. Maka, produktivitas pekerja akan mendorong aktivitas produksi barang maupun jasa yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

**Kata Kunci:** pembangunan berkelanjutan, pekerjaan layak (*decent works*), produktivitas, pertumbuhan ekonomi.

**Abstract**

Sustainable development accommodates economic, social and environmental aspects simultaneously. There are three elements that must be harmonized to achieve sustainable development, namely economic growth, social inclusion and environmental protection. Decent work and economic growth are among the goals of the SDGs needed to restore Indonesia's economy which was eroded by the Covid-19 pandemic crisis. To recover the Indonesian economy, it needs to be supported by the effective and efficient use of resources. This is intended to increase productivity which will accelerate Indonesia's economic growth. This article examines the link between increasing productivity and realizing decent work and economic growth, which is the 8th goal of the Sustainable Development Goals. Decent work is supported by decent wages and other things that support the welfare of workers provided by the employer (employer). If this is done by the employer then worker productivity will increase. Thus, worker productivity will encourage the production of goods and services which in turn can drive economic growth.

**Keywords:** sustainable development, decent works, productivity, economic growth

## PENDAHULUAN

Salah satu hal yang membedakan antara pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan konvensional adalah ditematkannya aspek ekonomi sejajar dengan aspek lingkungan dan aspek sosial. Selain itu, aspek sosial politik menjadi pertimbangan dalam analisa ekonomi merupakan perubahan yang signifikan dalam ilmu ekonomi. Pembangunan konvensional telah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun gagal dalam aspek sosial dan aspek lingkungan. Hal ini disebabkan pembangunan konvensional meletakkan aspek ekonomi pada pusat persoalan pertumbuhan, dan menempatkan aspek sosial dan aspek lingkungan pada posisi yang kurang penting. Sebagai akibatnya, terjadi ketimpangan pada distribusi pendapatan antar negara maupun di dalam negeri yang bersangkutan (Salim, 2010).

Pembangunan Berkelanjutan (*sustainable development*) didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi di masa yang akan datang dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan Berkelanjutan menyerukan upaya bersama guna membangun masa depan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh untuk manusia dan planet. Agar pembangunan berkelanjutan dapat dicapai, maka perlu untuk menyelaraskan tiga elemen inti yaitu : pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan hidup (Bappenas, 2021\_SDGs).

Kesepakatan pemimpin-pemimpin dunia terkait Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disahkan pada tanggal 25 September 2015. Adapun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan agenda tahun 2030 yang merupakan kesepakatan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. TPB/SDGs berprinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak ada satupun yang tertinggal atau “no one left behind”. Pada Gambar 1, TPB/SDGs terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang

telah berakhir pada tahun 2015 yang lalu (Bappenas, 2021\_SDGs).

**Gambar 1. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)**



Sumber : (Bappenas, 2021\_SDGs)

Salah satu tujuan SDGs yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi adalah tujuan 8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi). Tujuan ini menjadi fokus karena krisis pandemi Covid-19 telah mengakibatkan perekonomian Indonesia tergerus sehingga perlu usaha-usaha untuk memulihkan perekonomian Indonesia. Selain itu, pekerjaan yang layak dibutuhkan untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Bappenas, 2021\_SDGs).

Krisis pandemi Covid-19 memerlukan usaha pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkatkan output dalam perekonomian. Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien dapat meningkatkan produktivitas yang kemudian dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dimaksud. Selain itu, pertumbuhan ekonomi harus memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial. Penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien yang peduli lingkungan dan memperhatikan aspek sosial harus berjalan seiring sejalan agar pembangunan dapat berlanjut secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan dengan konsep Pembangunan Berkelanjutan.

Metode yang dipakai adalah metode kualitatif yang dinyatakan dengan pertanyaan penelitian (*research question*) yang akan menentukan metode pengumpulan data dan

bagaimana menganalisisnya. Pengumpulan data menggunakan observasi, analisis visual, studi pustaka, dan sebagainya. Pembahasan ditunjang oleh sumber-sumber yang kredibel dengan rentang waktu terkini yaitu di masa pandemi Covid-19.

Pembahasan dalam artikel ini difokuskan pada pertanyaan bagaimana peningkatan produktivitas dapat mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang merupakan tujuan ke-8 dari Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pembangunan Berkelanjutan

Konsep *sustainability* dan *sustainable developments* penting untuk dipahami. Pemahaman tersebut memainkan peranan yang penting untuk menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada di dunia saat ini, seperti cuaca ekstrem, kemiskinan, perubahan iklim, konflik bersenjata, dan ketidaksetaraan (*inequality*) yang ada di masyarakat. Selain itu, *sustainability* dan *sustainable development* juga berperan dalam dunia bisnis serta hampir setiap lapangan usaha. Contohnya, konsumen saat ini cenderung untuk membeli produk-produk yang menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (*sustainability*) (Maryville University, 2021).

Istilah *sustainability* dan *sustainable development* seringkali digunakan secara bergantian. Kedua istilah tersebut sama-sama menjelaskan adanya bahaya jika mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, Tetapi, terdapat nuansa yang membedakan kedua istilah tersebut (Maryville University, 2021).

**Sustainability** adalah istilah luas yang menggambarkan pengelolaan sumber daya tanpa menghabiskan sumber daya tersebut untuk generasi yang akan datang. Konsep ini melampaui kelestarian lingkungan, yaitu menyangkut sumber daya alam bumi, memasukkan keberlanjutan ekonomi dan sosial, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Adapun **sustainable development** menggambarkan proses-proses untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi jangka panjang maupun kualitas hidup tanpa mengorbankan kemampuan generasi

mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Maryville University, 2021).

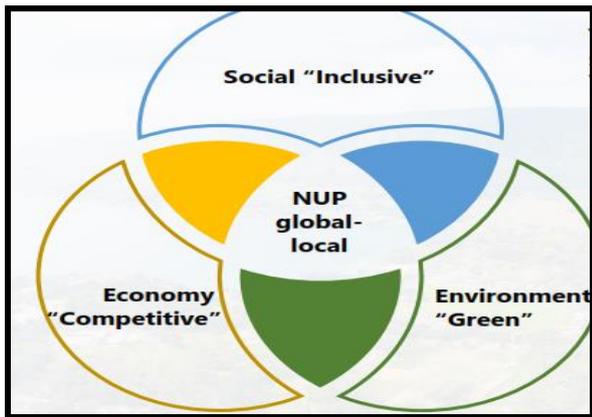
Menurut UNESCO (2021), konsep *sustainable development* (Pembangunan Berkelanjutan) terkadang disamakan dengan *sustainability* (Keberlanjutan). Istilah Keberlanjutan (*sustainability*) sering disebut sebagai tujuan jangka panjang. Adapun *sustainable development* mengacu pada beberapa proses dan peta jalan untuk mencapai Keberlanjutan (contohnya, *sustainable agriculture* yaitu proses atau peta jalan untuk mencapai pertanian yang berkelanjutan, *sustainable production* yaitu proses untuk mencapai produksi yang berkelanjutan, dan sebagainya) (UNESCO, 2021).

Pembangunan Berkelanjutan dapat mewujudkan kesejahteraan ekonomi jangka panjang. Serangkaian proses yang melingkupi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup menciptakan kondisi *sustainability*. Dalam kondisi ini, kebutuhan hidup saat ini dapat dipenuhi tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang. Dari aspek sosial, kesejahteraan individu maupun masyarakat adalah hal yang hendak dicapai. Pekerjaan merupakan salah satu cara untuk mencapai kesejahteraan dimaksud. Adapun pekerjaan yang menjamin keberlangsungan jangka panjang adalah pekerjaan yang layak.

Apabila setiap pelaku usaha menerapkan prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang ditunjang dengan peta jalan dan proses yang berkelanjutan maka lapangan usaha tersebut akan mengalami profit karena konsumen cenderung membeli produk-produk yang menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan demikian, profitabilitas pun meningkat yang berakibat pada pertumbuhan ekonomi suatu negara yang kemudian berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pekerjaan yang layak.

Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, terdapat 3 (tiga) pilar dari *sustainable development* yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Hal ini juga menggambarkan profit, planet dan orang. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi/profit diwakili oleh lingkaran ekonomi, kesejahteraan masyarakat diwakili oleh lingkaran sosial, dan bumi/planet diwakili oleh lingkaran lingkungan (Resosudarmo, 2021).

**Gambar 2. Pilar dari Sustainable Development**



Sumber : Paparan (Mulyo, 2021)

1. **Pilar ekonomi (profit)** menggambarkan bahwa penggunaan sumber daya yang efisien dan bertanggung jawab mengarah pada profitabilitas jangka panjang. Dalam bisnis, profitabilitas jangka panjang dapat berarti kelanggengan (umur panjang). Dengan kata lain, transisi ke bisnis yang berkelanjutan dapat meningkatkan peluang perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang;
2. **Pilar sosial (kesejahteraan masyarakat)** mendukung terciptanya komunitas yang sehat dan bahagia yang dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Dalam bisnis, inisiatif keberlanjutan sosial (*social sustainability*) seringkali mencakup pertimbangan praktek dan upah buruh yang adil, jaminan kesehatan, keamanan, kesejahteraan, keseimbangan kehidupan dan kerja karyawan, keberagaman, dan kesetaraan;
3. **Pilar bumi (lingkungan)** dalam praktek bisnis artinya mengurangi jejak karbon, limbah, dan penggunaan air sambil memaksimalkan efisiensi energi. Hal ini dapat memberikan manfaat lingkungan dan finansial, dan menunjukkan keberpihakan pada opini masyarakat (Maryville University, 2021).

Ketiga pilar dari *sustainable development* tersebut digambarkan sebagai diagram Venn sebagaimana terlihat pada Gambar 2 dimana tiga pilar tersebut yang direpresentasikan sebagai lingkaran, saling berpotongan untuk berbagi pusat bersama yaitu area Keberlanjutan (*the area of sustainability*). Visual ini menggambarkan bahwa Keberlanjutan (*sustainability*) hanya dapat tercapai jika ketiga

pilar tersebut ditangani bersama-sama (Maryville University, 2021).

## B. Pekerjaan Layak (*Decent Work*)

Pekerjaan yang layak (*decent work*) merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan ke-8 Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Adapun tujuan ke-8 tersebut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja produktif serta kerja layak untuk semua. Oleh karena itu, menempatkan penciptaan kesempatan kerja sebagai pusat dari pembuatan kebijakan ekonomi dan rencana pembangunan tidak hanya menghasilkan peluang kerja yang layak namun juga pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, inklusif dan dapat mengurangi kemiskinan (International Labour Organisation, 2021).

Selain itu, pekerjaan yang layak (*decent work*) juga merupakan aspek utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan salah satu kunci keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). *International Labour Organisation* mensosialisasikan pentingnya pekerjaan layak agar setiap orang di seluruh dunia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat menjamin kelangsungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 4 (empat) pilar strategis terkait pekerjaan layak, yaitu: (Badan Pusat Statistik, 2021 a)

1. **Hak di tempat kerja (*Rights at Work*).** Pekerjaan layak tidak dapat terwujud tanpa terpenuhinya hak-hak pekerja Tujuan dari pilar ini adalah untuk memastikan bahwa pekerjaan apapun harus menjamin aspek kesetaraan (*equality*), kebebasan (*freedom*), keamanan (*security*), dan martabat manusia (*dignity*). Terdapat empat kategori hak-hak dasar di tempat kerja yang harus terpenuhi yaitu : kebebasan berserikat, berorganisasi dan menyatakan pendapat, penghapusan segala bentuk kerja paksa, penghapusan pekerja anak secara efektif, dan penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan;
2. **Pekerjaan Penuh dan Produktif (*Full and Productive Employment*).** Lapangan pekerjaan yang tersedia harus mencukupi untuk semua orang yang mencari pekerjaan. Pekerjaan juga harus menghasilkan pendapatan cukup untuk

memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Menciptakan pekerjaan penuh dan produktif adalah tujuan utama dalam Agenda Pekerjaan Layak (*decent work*). Dengan demikian, penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan harus ditempatkan sebagai tujuan utama kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah;

3. **Perlindungan Sosial (*social protection*).** Perlindungan sosial berarti perlindungan dari kesulitan ekonomi yang diakibatkan oleh kehilangan pekerjaan, perbedaan jenis kelamin, usia, suku bangsa, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, serta cedera akibat kecelakaan kerja atau penyakit. Tujuannya adalah untuk melindungi pekerja dari kerentanan dan kerugian yang diakibatkan karena kehilangan pekerjaan, sakit atau telah memasuki usia tua;
4. **Dialog sosial (*social dialog*).** Dialog sosial mengacu pada negosiasi, pertemuan atau proses pertukaran informasi antara perwakilan pemerintah, pengusaha dan pekerja mengenai penyelesaian konflik, keadilan sosial, dan implementasi kebijakan yang efektif bagi kepentingan semua pihak. Dialog sosial ini penting untuk memelihara kerjasama antara pemerintah, pengusaha dan pekerja serta untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Pekerjaan yang layak (*decent works*) merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pekerjaan layak yang didukung oleh pilar-pilar strategis (profit, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan) mendorong adanya pendapatan yang setara dan pekerjaan yang produktif. Dalam hal ini, seluruh warga negara diberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk mendapatkan pekerjaan tanpa memandang usia, gender, disabilitas, dan sebagainya. Dengan kata lain, pendapatan yang setara dan pekerjaan yang produktif merupakan komponen penting dalam Pekerjaan Layak. Selain itu, pendapatan setara dan pekerjaan produktif digunakan sebagai indikator untuk menggambarkan produktivitas. Produktivitas yang meningkat akibat pekerjaan yang layak kemudian akan menunjang pertumbuhan ekonomi.

Keterkaitan antara produktivitas dan pekerjaan yang layak dapat tercermin dalam indikator-indikator, seperti *Low Pay Rate (LPR)*, rata-rata upah pada jenis pekerjaan terpilih, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai, indeks upah pekerja pada sektor industri.

### C. Pendapatan yang Setara dan Pekerjaan yang Produktif

Semua orang baik laki-laki maupun perempuan, termasuk pemuda dan penyandang disabilitas, diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, agar mereka dapat bekerja secara produktif dalam kondisi yang menjamin kesetaraan (*equality*), kebebasan (*freedom*), keamanan (*security*), dan martabat (*dignity*). Selain itu, pendapatan yang mencukupi adalah hal penting dalam memastikan kesejahteraan para pekerja dan merupakan komponen penting dalam Agenda Pekerjaan yang Layak (*Decent Work*) (Badan Pusat Statistik, 2021a). Selain itu, untuk menggambarkan produktivitas, indikator pendapatan yang setara dan pekerjaan produktif dipakai untuk pembahasan.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Badan Pusat Statistik, 2021a), terdapat 7 (tujuh) indikator pengukuran terkait Pendapatan Setara dan Pekerjaan yang Produktif, yaitu : (1) pekerja miskin; (2) *Low Pay Rate (LPR)*; (3) Rata-rata upah pada jenis pekerjaan terpilih; (4) Rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai; (5) persentase upah minimum terhadap upah median; (6) Indeks upah pekerja sektor industry; (7) pekerja yang mendapatkan pelatihan pada pekerjaan terkait. Namun, karena keterbatasan pada survei yang dilakukan, hanya indikator 2,3,4, dan 6 yang dapat dihasilkan (Badan Pusat Statistik, 2021a).

**Gambar 3. Persentase Buruh/Karyawan dengan Upah Rendah Tahun 2019-2020**

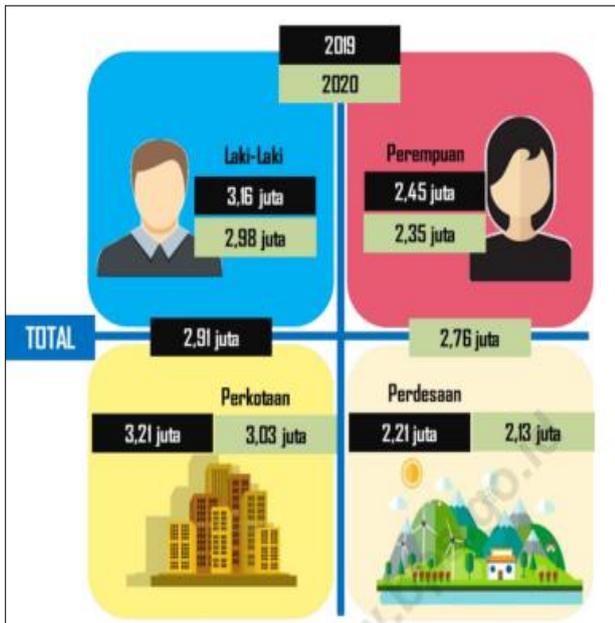


Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021a)

Seperti terlihat pada Gambar 3, terdapat penurunan persentase buruh/karyawan yang

menerima upah rendah, yang dapat juga mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan proporsi buruh yang menerima upah layak dari tahun 2019 ke 2020. Namun, hal ini belum menggambarkan adanya peningkatan produktivitas. Adapun produktivitas pekerja ditentukan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah motivasi (Ehrenberg & Smith, 2009).

**Gambar 4. Rata-rata Upah Pekerja per Bulan Menurut Jenis Kelamin dan Tempat Tinggal**



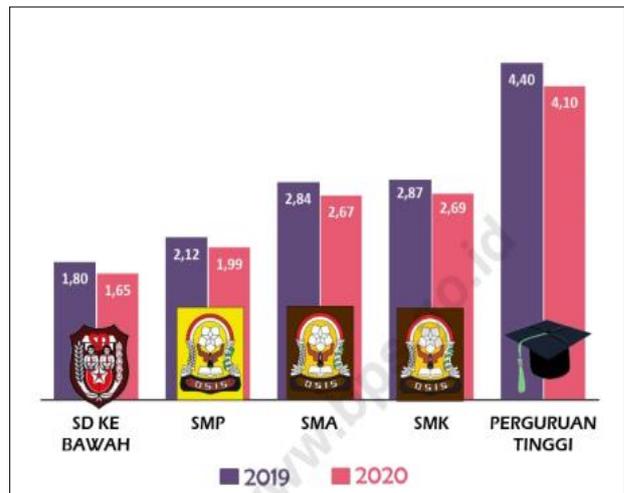
Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021 a)

Pada Gambar 4, terlihat bahwa rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai mencapai 2,76 juta rupiah per bulan pada tahun 2020. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan rata-rata upah pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,91 juta rupiah per bulan. Rata-rata upah buruh laki-laki lebih besar dibandingkan dengan rata-rata upah perempuan baik di tahun 2019 maupun 2020. Selain itu, menurut tempat tinggal, rata-rata upah buruh/karyawan/pegawai di perkotaan lebih besar dibandingkan dengan rata-rata upah di pedesaan.

Berdasarkan tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi upah yang diperoleh. Pada tahun 2020, ketika krisis pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk Indonesia, upah buruh/karyawan/pegawai di setiap jenjang pendidikan mengalami penurunan dibandingkan upah pada tahun 2019. Rata-rata upah tertinggi adalah buruh dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi, sedangkan upah paling rendah adalah buruh

dengan tingkat pendidikan SD ke bawah (Gambar 5).

**Gambar 5. Rata-rata Upah Pekerja per Bulan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2019-2020**



Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021 a)

Berdasarkan lapangan usaha, rata-rata upah tertinggi terdapat pada lapangan usaha jasa, kemudian diikuti oleh lapangan usaha industri dan pertanian. Pada tahun 2020, rata-rata upah tertinggi pada sektor jasa sebesar 2,85 juta rupiah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Adapun, rata-rata upah terendah pada sektor pertanian di tahun 2020 sebesar 1,91 juta rupiah juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 (Gambar 6).

**Gambar 6. Rata-rata Upah Pekerja per Bulan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2020**

LAPANGAN USAHA	2019	2020
PERTANIAN (AGRICULTURE)	2,03	1,91
INDUSTRI (MANUFACTURE)	2,94	2,78
JASA (SERVICE)	2,99	2,85
TOTAL	2,91	2,76

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021 a)

Berdasarkan gambaran upah pekerja (buruh/karyawan/pegawai) di Indonesia pada tahun 2019 sampai 2020, tren yang ada cenderung mengalami penurunan. Hal itu disebabkan karena pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia. Krisis pandemi

telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat bahkan menurun. Oleh karena itu, perlu usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas. Adapun produktivitas diharapkan dapat meningkatkan penghasilan dan juga meningkatkan daya beli pekerja. Daya beli yang meningkatkan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada Gambar 7, terlihat bahwa lapangan usaha dengan peningkatan produktivitas tertinggi adalah Jasa Keuangan dan Asuransi, yaitu dari 378,21 juta per tenaga kerja (2019) menjadi 446,79 juta per tenaga kerja (2020) atau meningkat sebesar 18,13 persen. Selanjutnya adalah Pengadaan Listrik dan Gas (16,32 persen). Selain itu, sektor *real estate* menjadi lapangan usaha dengan produktivitas tertinggi yaitu sebesar 1.152,71 juta per tenaga kerja pada tahun 2021. Produktivitas sektor *real estate* juga secara konsisten meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,73 persen setiap tahun terhitung sejak 2018 sampai 2020. Hal ini dapat menandakan bahwa sektor *real estate* memiliki prospek yang menjanjikan. Tambahan lagi, produktivitas tenaga kerja di sektor *real estate* sangat tinggi. Dengan demikian, prioritas utama pemerintah untuk peningkatan produktivitas dan daya saing di sektor *real estate* akan mudah dicapai (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pekerjaan layak didukung oleh upah yang layak dan hal-hal lainnya yang menunjang kesejahteraan seperti kompensasi kesehatan, tunjangan, fasilitas, dan lainnya. Secara timbal balik, pemberi kerja menuntut pekerjaan yang produktif sebagai ganti upah dan kompensasi yang diterima oleh pekerja. Produktivitas yang dihasilkan oleh pekerjaan produktif yang diberikan oleh pekerja dan upah yang layak yang diberikan oleh pemberi kerja menjamin keberlangsungan usaha/perusahaan. Dalam hal ini, keberlanjutan usaha/perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa mendorong pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 7. Produktivitas Menurut Kategori Lapangan Usaha**

Kategori Lapangan Usaha	2018r	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	51,96	56,78	55,33
B. Pertambangan dan Pengalihan	817,74	804,95	734,74
C. Industri Pengolahan	159,02	162,50	175,49
D. Pengadaan Listrik dan Gas	513,30	509,07	592,13
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	20,91	21,38	23,02
F. Konstruksi	184,73	196,16	204,88
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	82,34	85,27	80,78
H. Transportasi dan Pergudangan	145,27	155,85	123,34
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	53,14	51,41	46,14
J. Informasi dan Komunikasi	617,93	680,13	745,59
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	338,67	378,21	446,79
L. Real Estate	1031,12	1088,02	1152,71
M,N. Jasa Perusahaan	158,53	156,60	163,77
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	113,65	115,53	126,95
P. Jasa Pendidikan	78,11	81,41	91,13
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	84,09	88,13	100,30
R,S,T,U. Jasa lainnya	44,12	48,55	47,21

Catatan: <sup>r</sup> Angka revisi sesuai data PDB terbaru  
 Data PDB Tahun 2019 adalah angka sementara dan Data PDB tahun 2020 adalah angka sangat sementara

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021 a)

**D. Upah dan Produktivitas**

Salah satu pilar dari Pembangunan Berkelanjutan adalah pilar sosial. Adapun pilar sosial ini terkait dengan aspek-aspek yang mendukung kesejahteraan individu maupun masyarakat pada umumnya, seperti upah yang layak, jaminan sosial maupun bentuk kompensasi lainnya. Selain itu, penciptaan pekerjaan yang layak (*decent work*) melalui pekerjaan penuh dan produktif merupakan agenda penting dalam usaha pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui hal-hal yang mempengaruhi kesejahteraan pekerja.

Pelaku usaha dalam suatu bisnis (*employers*) dalam model permintaan yang paling sederhana, hanya mempertimbangkan tingkat produktivitas pekerja dan upah pekerja sesuai ketentuan yang ada. Dalam model sederhana ini, pelaku usaha akan mempekerjakan pekerja yang paling memberikan keuntungan setelah

mempertimbangkan produktivitas dan upah yang berlaku.

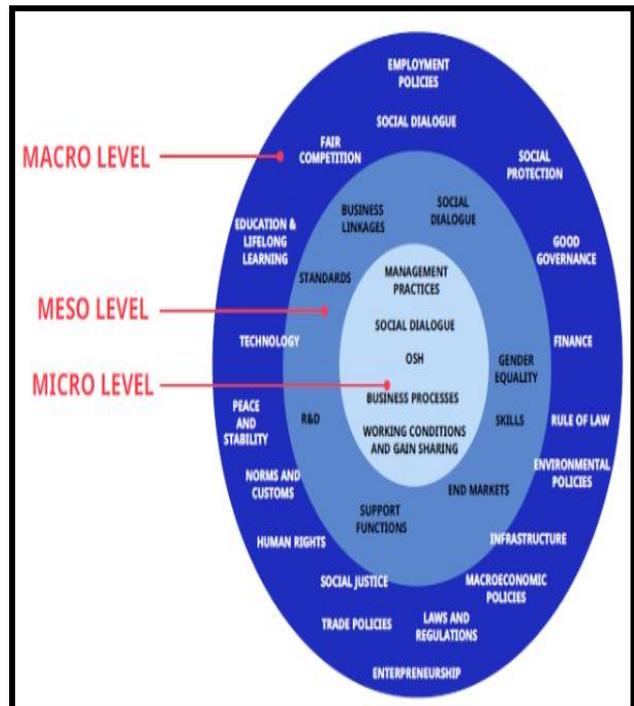
Namun, beberapa pelaku usaha mempertimbangkan kebijakan pemberian kompensasi. Contohnya, ada pelaku usaha yang menawarkan pelatihan teknis. Dalam hal ini, pelaku usaha tersebut mempertimbangkan kategori upah yang akan dibayar dan harus menyeimbangkan antara biaya-biaya terkait pelatihan teknis tersebut dan keuntungan yang akan diterima sehubungan dengan mempertahankan pekerja penerima pelatihan tersebut. Selain itu, ketika paket kompensasi ditambah dengan *employee benefits* (contohnya jaminan kesehatan, dll), pelaku usaha harus menentukan paket-paket upah dan *benefit* yang ditawarkan kepada pekerja. Dalam hal ini, pelaku usaha menetapkan upah seperti pada kasus monopsoni dimana hanya ada satu pembeli pada pasar tenaga kerja, yaitu pelaku usaha itu sendiri (Ehrenberg & Smith, 2009).

Terkait produktivitas yang dapat mempengaruhi upah, pelaku usaha memperhatikan realitas-realitas yang ada yaitu : (1) pekerja berbeda satu sama lain dalam hal kebiasaan kerja yang mempengaruhi produktivitas, namun hal tersebut sulit untuk diamati sebelum bahkan sesudah rekrutmen; (2) Produktivitas pekerja dengan level *human capital* tertentu sangat bervariasi dari waktu ke waktu, atau bervariasi dalam lingkungan yang berbeda, tergantung motivasi pekerja tersebut; (3) Produktivitas pekerja selama periode waktu tertentu dipengaruhi oleh kemampuan bawaan, tingkatan kerja keras, dan lingkungan (contohnya cuaca, kondisi bisnis secara umum, atau tindakan dari pekerja lainnya); (4) Menjadi produktif tidak selalu mengikuti perintah, namun lebih pada mengambil inisiatif untuk membantu majikan (*employer*) (Ehrenberg & Smith, 2009).

Pada Gambar 8, disebutkan bahwa terdapat berbagai penggerak untuk meningkatkan produktivitas baik di level mikro, meso maupun makro. Adapun untuk tingkat mikro, beberapa hal yang perlu dilakukan adalah : (1) menerapkan praktek-praktek manajemen yang baik; (2) membentuk *social dialogue* (contohnya membentuk Serikat Pekerja); (3) *Occupational Safety and Health* (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) harus dijaga; (4) menetapkan proses bisnis; (5) menjaga

lingkungan kerja yang kondusif (Kazutoshi, 2021).

**Gambar 8. Bagaimana Meningkatkan Produktivitas**



Sumber : Paparan (Kazutoshi, 2021)

Beberapa hal yang dapat mempengaruhi motivasi pekerja yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas diantaranya adalah: (1) kompensasi yang berupa bonus, tunjangan, fasilitas, dan sebagainya. Kompensasi ini dapat meningkatkan motivasi pekerja (2) *formal contract* yang merupakan perjanjian formal kedua belah pihak dan tidak dapat dibatalkan sepihak tanpa adanya penalti. Hal ini membuat pekerja dapat bekerja dengan tenang dan meningkatkan motivasi; (3) Upah berdasarkan kinerja dimana pekerja dibayar berdasarkan output yang dihasilkan; (4) persepsi kesetaraan. Perasaan diperlakukan secara adil di tempat kerja dapat meningkatkan produktivitas pekerja.

Membayar upah yang lebih tinggi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan : (1) menarik karyawan-karyawan lainnya yang lebih baik untuk melamar. Sehubungan dengan hal tersebut, perusahaan memiliki banyak alternatif dan akan lebih selektif dalam merekrut pekerja sehingga perusahaan akan mendapat pekerja yang lebih berpengalaman, dapat diandalkan serta bermotivasi tinggi; (2)

membangun komitmen pekerja. Dengan menerima upah yang layak, kecil kemungkinan pekerja tersebut akan berhenti atau mencari pekerjaan di tempat lain. Pemberi kerja pun akan cenderung untuk memberikan pelatihan-pelatihan dan menuntut kerja yang cepat dan produktif dari pekerjanya. Pekerja pun menyadari bahwa dengan dibayar secara layak dan diatas upah rata-rata apabila bekerja di tempat lainnya, maka pekerja tersebut rugi apabila berhenti kerja atau pindah kerja (Ehrenberg & Smith, 2009).

Produktivitas adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Kementerian Keuangan, 2017). Di masa yang akan datang, perlu perbaikan produktivitas multi faktor. Selain itu, produktivitas di sektor manufaktur yang merupakan salah satu kontributor pertumbuhan ekonomi Indonesia telah mendukung pertumbuhan TFP (*Total Factor Productivity*) di Indonesia, walaupun secara keseluruhan pertumbuhannya masih rendah.

Pada Gambar 7, terlihat bahwa pada tahun 2020 sektor industri pengolahan memiliki pertumbuhan produktivitas yang tinggi yaitu sebesar 7,99 persen jika dibandingkan dengan tahun 2019. Sementara itu, pertumbuhan produktivitas sektor *real estate* pada tahun 2020 hanya tumbuh sebesar 5,94 persen dibandingkan tahun 2019. Padahal, dalam hal nominal, nilai produktivitas sektor *real estate* lebih tinggi yaitu 1.152,71 dibanding sektor industri pengolahan sebesar 175,49 pada tahun 2020.

Pada Gambar 9, berdasarkan PDB atas dasar harga konstan, sebagian besar lapangan usaha di Indonesia mengalami kontraksi pada tahun 2020. Beberapa sektor lapangan usaha yang masih menunjukkan pertumbuhan yang positif, yaitu: (1) sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial; (2) sektor informasi dan komunikasi; (3) sektor pertanian, sektor kehutanan dan perikanan; (4) sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; (5) sektor jasa pendidikan; dan (6) sektor jasa keuangan dan asuransi; (7) sektor *real estate* (Badan Pusat Statistik, 2021).

**Gambar 9. Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2020**

Lapangan Usaha	2017	2018	2019*	2020**
PDB Harga Konstan Tahun 2020 (miliar Rupiah) dan Pertumbuhan PDB (%)				
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.258.375,7	1.307.253,0	1.354.399,1	1.378.131,3
	3,92	3,88	3,61	1,75
B. Pertambangan dan Penggalian	779.678,4	796.505,0	806.206,2	790.475,2
	0,66	2,16	1,22	-1,95
C. Industri Pengolahan	2.103.466,1	2.193.368,4	2.276.667,8	2.209.920,3
	4,29	4,27	3,80	-2,93
D. Pengadaan Listrik dan Gas	101.551,3	107.108,6	111.436,7	108.826,4
	1,54	5,47	4,04	-2,34
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.985,3	8.429,4	9.004,9	9.449,3
	4,59	5,56	6,83	-3,26
F. Konstruksi	987.924,9	1.048.082,8	1.108.425,0	1.072.334,8
	6,80	6,09	5,76	-3,26
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.311.746,5	1.376.878,7	1.440.263,0	1.386.695,4
	4,46	4,97	4,60	-3,72
H. Transportasi dan Pergudangan	406.679,4	435.336,5	463.157,5	393.481,9
	8,49	7,05	6,39	-15,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	298.129,7	315.068,6	333.306,8	299.248,0
	5,41	5,68	5,79	-10,22
J. Informasi dan Komunikasi	503.420,7	538.762,7	589.536,1	651.930,9
	9,63	7,02	9,42	10,58
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	398.971,4	415.620,6	443.093,1	457.482,0
	5,47	4,17	6,61	3,25
L. Real Estate	289.568,5	299.648,2	316.901,1	324.259,4
	3,60	3,48	5,76	2,32
M,N. Jasa Perusahaan	172.763,8	187.691,1	206.936,2	195.671,1
	8,44	8,64	10,25	-5,44
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	326.514,3	349.277,6	365.533,8	365.440,9
	2,05	6,97	4,65	-0,03
P. Jasa Pendidikan	304.810,8	321.133,8	341.355,1	350.329,8
	3,72	5,36	6,30	2,63
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	109.497,5	117.322,2	127.522,1	142.309,7
	6,84	7,15	8,69	11,60
R,S,T,U. Jasa Lainnya	170.174,8	185.405,6	205.011,4	196.608,7
	8,73	8,95	10,57	-4,10
A. NILAI TAMBAH BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN	9.531.259,1	10.002.892,8	10.498.755,9	10.332.595,1
	13,28	10,82	6,46	-13,42
B. PAJAK DIKURANGI SUBSIDI ATAS PRODUK	381.669,00	422.959,10	450.281,90	389.847,60
	5,07	5,17	5,02	-2,07
C. PRODUK DOMESTIK BRUTO	9.912.928,10	10.425.851,90	10.949.037,80	10.722.442,70
	5,07	5,17	5,02	-2,07

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021 a)

Pada tahun 2020, pertumbuhan PDB (berdasarkan harga konstan 2010) dari sektor industri pengolahan juga mengalami perlambatan. Padahal, pertumbuhan produktivitas dari sektor industri pengolahan cukup tinggi pada tahun 2020 yaitu sekitar 7,99

persen (Gambar 7). Oleh karena itu, perlu usaha dari pemerintah untuk mengembangkan sektor industri pengolahan karena tingkat pertumbuhan produktivitasnya yang tinggi. Beberapa usaha yang dilakukan oleh pemerintah yaitu : (1) memfasilitasi pertumbuhan industri pendukung; (2) memperbaiki infrastruktur jalan, pelabuhan, dan energi; (3) meningkatkan iklim investasi; (4) mengoptimalkan industri nasional untuk bergabung dengan *global value chain*; (5) deregulasi yang berkelanjutan dalam bidang logistik dan distribusi; (6) menjamin ketersediaan faktor produksi dengan harga yang kompetitif, khususnya energi; (7) meningkatkan produktivitas manufaktur dengan lapangan kerja yang tinggi melalui penyediaan tenaga kerja yang sangat terampil, dan (8) meningkatkan pendidikan melalui pendidikan konvensional maupun sekolah kejuruan (Badan Pusat Statistik, 2021a).

Pertumbuhan ekonomi juga menyerap tenaga kerja yang merupakan salah satu modal dalam produksi barang atau jasa. Dengan adanya krisis pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan secara umum. Namun, terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami kenaikan di sektornya. Untuk memulihkan perekonomian yang menurun tersebut dibutuhkan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, diperlukan juga usaha-usaha untuk meningkatkan kapasitas pekerja seperti pemberian pelatihan teknis di bidangnya dan sebagainya.

### E. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja

Pertumbuhan ekonomi mendukung produksi barang atau jasa dalam suatu perekonomian. Produksi barang atau jasa mempengaruhi ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga menentukan keberlangsungan atau eksistensi usaha/perusahaan. Adapun tenaga kerja adalah salah satu modal dalam memproduksi barang atau jasa. Dengan demikian, laju pertumbuhan ekonomi akan mendorong laju pertumbuhan kesempatan kerja. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dapat dijelaskan melalui elastisitas kesempatan kerja. Elastisitas kesempatan kerja adalah perbandingan antara laju pertumbuhan kesempatan kerja

dan laju pertumbuhan ekonomi (nilai Produk Domestik Bruto) (Badan Pusat Statistik, 2021).

Pada Gambar 10, terlihat bahwa hampir sebagian lapangan usaha memiliki angka elastisitas kesempatan kerja yang inelastis (dibawah 1) Angka elastisitas dibawah 1 persen menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia belum mampu memperluas kesempatan kerja. Selama tahun 2018-2020, elastisitas kesempatan kerja di Indonesia hanya sebesar 0.61 persen. Artinya, setiap satu persen kenaikan PDB hanya mampu meningkatkan 0,61 persen kesempatan kerja (Badan Pusat Statistik, 2021).

**Gambar 10. Elastisitas Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2020**

Lapangan Usaha	Rata-Rata Laju		Elastisitas Kesempatan Kerja
	Kesempatan Kerja (%)	Pertumbuhan PDB (%)	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,23	2,68	0,83
B. Pertambangan dan Penggalian	-3,97	-0,38	10,46
C. Industri Pengolahan	-2,88	0,38	-7,65
D. Pengadaan Listrik dan Gas	-6,08	0,80	-7,61
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,20	5,88	0,20
F. Konstruksi	-2,34	1,15	-2,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,61	0,36	7,34
H. Transportasi dan Pergudangan	0,91	-4,93	-0,18
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,89	-2,54	-1,92
J. Informasi dan Komunikasi	1,58	10,00	0,16
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	-7,48	4,92	-1,52
L. Real Estate	-0,01	4,03	0,00
M,N. Jasa Perusahaan	3,27	2,10	1,55
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-2,08	2,29	-0,91
P. Jasa Pendidikan	-1,14	4,45	-0,26
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,29	10,14	0,32
R,S,T,U. Jasa lainnya	2,62	2,98	0,88
<b>Jumlah</b>	<b>0,86</b>	<b>1,41</b>	<b>0,61</b>

Sumber : (Badan Pusat Statistik, 2021)

Dari sebagian lapangan usaha yang memiliki elastisitas kurang dari 1 persen (inelastis), sektor

industri pengolahan memiliki nilai elastisitas negatif terbesar yaitu 7,65 persen. Angka itu menunjukkan bahwa setiap peningkatan PDB di kategori lapangan usaha industri pengolahan sebesar 1 persen akan mengurangi 7,65 persen ketersediaan lapangan pekerjaan. Sementara itu, angka elastisitas kesempatan kerja yang tinggi terjadi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, yaitu sebesar 7,34 persen. Artinya, setiap peningkatan satu persen PDB pada lapangan usaha tersebut maka akan meningkatkan 7,34 persen ketersediaan lapangan pekerjaan (Badan Pusat Statistik, 2021).

Tingginya elastisitas tenaga kerja sektor perdagangan ini merupakan salah satu pembuka dalam upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Dalam menghadapi tantangan di sektor perdagangan, pemerintah akan melaksanakan berbagai langkah dan kebijakan. Langkah-langkah yang dimaksud antara lain : (1) menjaga stabilitas harga atau inflasi; (2) membantu pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam menembus pasar ekspor, dan (3) meningkatkan ekspor melalui perjanjian kerja sama perdagangan internasional (Badan Pusat Statistik, 2021).

Dengan mengetahui produktivitas tenaga kerja di berbagai lapangan usaha, Pemerintah dan sektor terkait dapat merumuskan kebijakan maupun langkah-langkah antisipatif lainnya. Selain itu, usaha-usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja baru diharapkan dapat mendorong pembangunan, dalam hal ini peningkatan produksi barang atau jasa. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja akan lebih meningkat dalam rangka mendukung pembangunan.

## KESIMPULAN

Pembangunan Berkelanjutan yang melingkupi aspek sosial dan lingkungan selain aspek ekonomi mewujudkan kesejahteraan melalui pekerjaan yang layak. Untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan, pekerjaan yang layak memberi kesempatan yang luas kepada seluruh warga negara untuk bekerja tanpa memandang usia, gender, disabilitas, dan sebagainya. Pekerjaan yang layak didukung oleh pendapatan yang setara dan pekerjaan

yang produktif sehingga meningkatkan produktivitas. Produktivitas dalam hal ini adalah penggunaan sumber-sumber daya secara efektif dan efisien terutama produk-produk yang terbuat dari bahan-bahan yang menunjang *sustainability* sehingga bermanfaat dalam jangka waktu yang panjang. Penggunaan sumber-sumber daya yang berkelanjutan menunjang produktivitas yang kemudian berkontribusi pada tingkat profitabilitas. Secara makro, produktivitas yang berkontribusi pada profit akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan masyarakat yang berkontribusi pada pendapatan yang layak bagi pekerja.

Sangat disarankan bagi pelaku usaha maupun pemerintah menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Bagi pelaku usaha agar menggunakan bahan-bahan yang tahan lama dan hemat energi sehingga *average cost* menurun dan profit meningkat. Bagi pemerintah sebaiknya mendukung pelaku-pelaku ekonomi dengan program-program yang mendukung pembangunan berkelanjutan seperti kesetaraan gender, jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan sebagainya.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2021a, Juli 6). Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia 2020. Retrieved Desember 28, 2021, from [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id): <https://www.bps.go.id/publication/2021/07/06/a150047cc0de89dd9fafa881/indikator-pekerjaan-layak-di-indonesia-2020.html>
- Badan Pusat Statistik. (2021). Laporan Perekonomian Indonesia . Jakarta: Badan Pusat Statistik. Bappenas. (2021\_SDGs). Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Retrieved Desember 26, 2021, from <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Ehrenberg, R. G., & Smith, R. S. (2009). *Modern Labor Economics*. Boston: Pearson International Edition.
- Ekins OBE, P. (2021, Desember 1-3). Towards a New Era of Sustainable Growth. Paparan pada 10th Annual International Forum on Economic Development and Public Policy . Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
- International Labour Organisation. (2021). [www.ilo.org](http://www.ilo.org). Retrieved Desember 27, 2021, from Kerja Layak dan Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms\\_451904.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_451904.pdf)
- Kazutoshi, C. (2021, Desember 1-3). Global Labour Market Trends : Labour Productivity. Paparan pada 10th Annual International Forum on Economic Development . Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Perdagangan.
- Kementerian Keuangan. (2017, April 21). [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id). Retrieved Januari 1, 2022, from Menkeu : Produktivitas adalah Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Jangka Panjang: <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-produktivitas-adalah-pendorong-pertumbuhan-ekonomi-jangka-panjang/>
- Lumanauw, N., Cahyoputra, L., & Pangastuti, T. (2021, Juli 13-15). Investasi Kunci Akselerasi Pertumbuhan. Investor Daily Summit 2021 . Jakarta: Investor Daily dan Berita Satu Media Holding.
- Maryville University. (2021). [www.online.maryville.edu](http://www.online.maryville.edu). Retrieved Desember 27, 2021, from <https://online.maryville.edu/blog/sustainability-vs-sustainable-development/>
- Mulyo, S. A. (2021, Desember 1-3). Developing Region-Based Policy to Support Inclusive and Sustainable Economic Growth. Paparan pada Annual International Forum on Economic Development . Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan.
- Resosudarmo, B. P. (2021, Desember 1-3). Sustainable Regional Development in Indonesia. Paparan pada 10th Annual International Forum on Economic Development . Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Perdagangan.
- Salim, E. (2010). Paradigma Pembangunan Berkelanjutan. In I. J. Azis, L. M. Napitupulu, A. A. Patunru, & B. P. Resosudarmo, *Pembangunan Berkelanjutan - Peran dan Kontribusi Emil Salim* (p. 21). Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- The World Bank; Bappenas; Australian Government. (2020). *Indonesia's Occupational Employment Outlook - 2020 Technical Report*. Jakarta: Bappenas.
- UNESCO. (2021). <https://en.unesco.org/>. Retrieved Desember 27, 2021, from <https://en.unesco.org/themes/education-sustainable-development/what-is-esd/sd>
- United Nations. (2021, April). [www.un.org](http://www.un.org). Retrieved Desember 27, 2021, from A UN framework for the immediate socio-economic response to COVID-19: [https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un\\_framework\\_report\\_on\\_covid-19.pdf](https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/un_framework_report_on_covid-19.pdf)
- Wilson, D., 20 November 1995, Summary of Citing Internet Sites, *NETTRAIN Discussion List*, (Online), (NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu, diakses 22 November 1995).